

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR ARTO MORO  
TAHUN 2021**



**Jl. Gajah Raya No. 155 Semarang  
TELEPON: 024-6747220**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 Faktor yaitu :

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan
5. penerapan fungsi kepatuhan
6. penerapan fungsi audit intern
7. penerapan fungsi audit ekstern
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas Maksimum Pemberian kredit
10. Rencana Bisnis
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BPR ARTO MORO telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2021 dengan meliputi 10 (sepuluh) faktor, dikarenakan Modal inti dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Darmawan, S.Sos
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama : a. Menentukan kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan b. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan Bank c. Menyusun rencana bisnis bank setiap tahun, bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi d. Mengadakan perubahan- perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank e. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah yang masuk dalam batas wewenang f. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama- sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan g. Menandatangani surat-surat dan dokumen penting bank baik sendiri ataupun bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris h. Bertanggungjawab terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris i. Meja keseimbangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan baik, aman dan lancar		
2.	Nama	:	EKa Andika Latif
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : a. Bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan perusahaan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank b. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan organisasi c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para kepala bagian, setelah dipertimbangkan dengan Direktur		

Utama d. Bertanggungjawab atas penyusunan laporan/ program dan realisasinya pada setiap periode pertanggungjawaban anggaran e. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan g. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain h. Memastikan terlaksanakannya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan i. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR j. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</b> - Peningkatan KPMM minimal 15 % dengan penilaian kembali aktiva tetap kantor pusat jl. Gajah Raya serta keikutsertaan Asuransi Jamkrida - Peningkatan Outstanding kredit - Peningkatan Likuiditas
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b> Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	DR. H Subyakto, SH.,MH., MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham b. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan c. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris d. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat e. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari f. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris g. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan		

	jelas. h. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi. i. Mengembangkan standar Good Corporate Governance yang terbaik		
2.	Nama	:	Slamet Arisno, SH
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak- pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. c. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis d. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. e. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. f. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. g. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait; h. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham i. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja. j. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	Monitoring secara menyeluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah sesuai rencana bisnis bank Direksi lebih ketat dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, serta memonitor seluruh kredit existing Direksi memenuhi komitmen ke OJK sesuai LHP OJK dan menyampaikan bukti pelaksanaan penyelesaiannya Meningkatkan pemahaman SDM BPR terhadap ketentuan penerapan program APU- PPT melalui pelatihan yang berkelanjutan monitoring penerapan program APU-PPT Meningkatkan sistem pengendalian intern penerapan program APUPPT melalui pelaksanaan audit oleh SKAI secara berkala dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
nihil	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	nihil			

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Darmawan, S.Sos	Rp0,00	0%
2.	EKa Andika Latif	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki Saham Anggota			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Darmawan, S.Sos			
2.	EKa Andika Latif			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

### C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Darmawan, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EKa Andika Latif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Darmawan, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	EKa Andika Latif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DR. H Subyakto, SH.,MH., MM	Rp6.730.000.000,00	94.38%
2.	Slamet Arisno, SH	Rp200.000.000,00	2.81%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris Utama merangkap sebagai Pemegang Saham Pengendali			



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Slamet Arisno, SH	602585	PT BPR ARTO MORO	2.81%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR. H Subyakto, SH.,MH., MM	Tidak ada	Tidak ada	Hj Ria Kusumawardani, SH.,M.Kn - istri
2.	Slamet Arisno, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR. H Subyakto, SH.,MH., MM	Tidak ada	Tidak ada	Hj. Ria Kusumawardani, SH., M.Kn - Istri
2.	Slamet Arisno, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pemegang Saham				

## **F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

### **1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp330.160.000,00	2	Rp238.640.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp106.000.000,00	2	Rp42.000.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	2	Rp1.796.666.667,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp436.160.000,00</b>		<b>Rp2.077.306.667,00</b>

### **2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	mobil (2)	mobil (1)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>			
Anggota Direksi masing-masing memperoleh fasilitas kendaraan berupa mobil inventaris. untuk Direktur Utama memperoleh Fasilitas Driver Anggota Dewan Komisaris memperoleh Fasilitas kendaraan Inventaris dan Driver			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.24 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.35 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan gaji pegawai yang terendah = 5.24 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah = 1.35 : 1 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah = 1.5 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi = 1.7 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi = 1.5 : 1	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 Juli 2021	2	evaluasi RBB sampai dengan bulan Juni 2021 Evaluasi perkembangan tindak lanjut hasil audit OJK Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, APU & PPT, dan manajemen SDM Pembahasan Isu-Isu Strategis yaitu menjaga likuiditas dengan meningkatkan linkage program
2.	09 Februari 2021	2	Pembahasan Isu-Isu Strategis
3.	07 September 2021	2	evaluasi RBB sampai dengan bulan Septemeber 2021 Evaluasi perkembangan tindak lanjut hasil audit OJK Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, APU & PPT, dan manajemen SDM
4.	23 November 2021	2	Evaluasi RBB bulan Oktober 2021 Rencana RBB tahun 2022 Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko,

		APU & PPT, dan manajemen SDM Evaluasi penetapan kebijakan strategis
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :		
Evaluasi Pencapaian RBB di tahun 2021 per Triwulan Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen risiko, penerapan fungsi kepatuhan & APU PPT Komitmen terhadap pemeriksaan Intern dan Ekstern Tindak lanjut kewajiban bank untuk meningkatkan KPMM dengan penilaian kembali aktiva tetap kantor pusat PT. BPR Arto Moro serta keikutsertaan Asuransi Jamkrida Pembahasan Isu-Isu Strategis yaitu menjaga likuiditas dengan meningkatkan linkage program Evaluasi penetapan kebijakan strategis penyaluran kredit di masa pandemi		

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	DR. H Subyakto, SH.,MH., MM	4	0	100%
2.	Slamet Arisno, SH	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
seluruh Dewan Komisaris hadir dalam Rapat				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
nihil								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut</b>		
Dalam Proses Penyelesaian 1. Atas Perkara no. 564/Pdt.G/2021/PN.Smg di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Sengketa perdata kepemilikan SHM, SHM yang menjadi objek sengketa saat ini oleh debitur atas nama Yulianto Plafon Rp. 452.000.000, dijaminkan di PT. BPR Arto Moro dan penggugat mengklaim sudah melakukan pembelian rumah dari Yulianto selaku pengembang. Penggugat 2. Atas Perkara No. 301/Pdt.G/2020/PN, Pemilik sertifikat tidak merasa melakukan jual beli kepada debitur, istri dari pemilik sertifikat melakukan pemalsuan dengan membawa suami palsu untuk proses jual beli. sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini sedang dijaminkan oleh Tergugat ke BPR Arto Moro. Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>							
Nihil							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Maret 2021	Sosial	Pemberian Sumbangan Untuk pembangunan masjid	Pengurus Masjid	Rp4.500.000,00
2.	22 Februari 2021	Sosial	sumbangan	Pengurus Masjid	Rp5.950.000,00

			kegiatan Ramadhan Masjid & sumbangan ke masjid lingkungan Kantor		
3.	13 Agustus 2021	Sosial	sumbangan nasi kotak kepada masyarakat kota semarang dari bulan agustus - Desember 2021 yang dilaksanakan rutin setiap minggu	masyarakat	Rp59.379.600,00
4.	24 September 2021	Sosial	Pemberian Sumbangan setiap bulan Kepada Guru-Guru Yayasan TK Islam Nurul Falah	Pengurus Yayasan Masjid	Rp24.524.000,00
5.	01 September 2021	Sosial	sumbangan sembako diberikan setiap bulan kepada warga sekitar	warga	Rp22.065.300,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
pemberian sumbangan ditahun 2021 diberikan kepada warga sekitar, Pembangunan masjid, sumbangan kepada guru dan Karyawan yang mengajar di Yayasan Islam, dan warga sekitar kantor Pusat berupa uang dan sembako yang dilaksanakan setiap minggu dan bulanan					

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR Arto Moro  
 Alamat : Jl. Gajah Raya No. 155 Semarang  
 Nomor Telepon : 024-6747220  
 Posisi Laporan : Desember 2021  
 Modal Inti : Rp22.370.375.004,00  
 Total Aset : Rp526.048.371.040,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Arto Moro Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.50	0.300
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.00	0.200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			1.900
Predikat Komposit			Baik

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.5)**

Jumlah Anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000, bertempat tinggal di satu kota dengan kantor pusat BPR, Seluruh anggota Direksi tidak merangkap pada Bank lain.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai Pedoman tata tertib tugas dan tanggung jawab Direksi

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)**

Jumlah Dewan Komisaris ( 2 ) terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris yang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan, dimana dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)**

Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, sehingga Fungsi Kepatuhan sudah dijalankan serta bank telah memiliki pedoman Fungsi Kepatuhan

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)**

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Ipenden terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung Jawab kepada Direktur Utama

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)**

Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)**

Bank telah memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko, serta telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko merangkap Fungsi Kepatuhan, Pejabat Manajemen Risiko bertanggung Jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)**



Bank telah memiliki pedoman BMPK dan telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris  
Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang telah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan penerapan manajemen risiko  
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Analisis : Baik

Faktor : 1

Jumlah Anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,

Faktor : 2

Jumlah Dewan Komisaris ( 2 ) terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris yang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat

Faktor : 3

Bank belum berkewajiban karena modal inti dibawah 50 Milyar

Faktor : 4

Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan, dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan

Faktor : 5

Fungsi Kepatuhan sudah dijalankan serta bank telah memiliki pedoman Fungsi Kepatuhan

Faktor : 6

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung Jawab kepada Direktur Utama

Faktor : 7

Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK

Faktor : 8

Bank telah memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko merangkap Fungsi Kepatuhan, yang bertanggung Jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Faktor : 9

Bank telah memiliki pedoman BMPK dan telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Faktor : 10

Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang telah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR  
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

Faktor : 11

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda tangani  
Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

Semarang, 20 April 2022

**PT BPR Arto Moro**

**Menyetujui**

**Darmawan,S.Sos**  
Direktur Utama

**DR. H. Subyakto, SH.,MH.,MM**  
Komisaris Utama